

**PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
KERJA (SMK3) OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI RIAU**

**Oleh : Leni Yumaida Putri**

Leniyumaidaputri.lyp@gmail.com

**Pembimbing : Mimin Sundari Nst, S.Sos, M.Si**

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

28293 Telp/Fax (0761) 63277

**ABSTRAK**

Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berhasil merupakan salah satu faktor pendukung berhasilnya pembinaan K3 yang telah dilaksanakan. Provinsi Riau mendapatkan penghargaan sebagai pembina K3 terbaik secara nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan selama lima tahun terakhir tetapi kenyataannya pembinaan yang dilakukan tidak berbanding lurus dengan penghargaan tersebut. Tujuan penelitian ini menunjukkan bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori pembinaan Santoso (dalam Harifal, 2014) yang menggunakan indikator yaitu : Pemberian bimbingan, Memberikan pengarahan, Memberikan pendidikan dan pelatihan, serta Memberikan instruksi-instruksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pembinaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus dibina, pembagian lokasi kerja yang luas sehingga sulit menjangkaunya dan anggaran yang tidak mumpuni untuk melaksanakan segala kegiatan sehingga kegiatan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal.

***Kata Kunci:*** Pembinaan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan SMK3 di perusahaan merupakan salah satu program untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dengan mengkomunikasikan dan mendukung rencana dalam mencapai tujuan yang diharapkan, mengintegrasikan dan menjaga komitmen pada keselamatan dan kesehatan kerja serta fokus pada perbaikan berkelanjutan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Perbaikan berkelanjutan dari sebuah SMK3 perusahaan harus didukung oleh pembinaan dari pihak eksternal seperti pemerintah agar mengarahkan penerapan SMK3 perusahaan lebih baik lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan norma ketenagakerjaan. Salah satu unsur kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan khususnya norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah penerapan SMK3 di perusahaan. Untuk itu diperlukan pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan SMK3 di perusahaan oleh pemerintah sehingga penerapan SMK3 berjalan sesuai

peraturan dan usaha untuk melindungi pekerja dapat terwujud.

**Tabel 1.1**  
**Penganugerahan Penghargaan K3 yang diterima Provinsi Riau**

Tahun	Kategori Penghargaan	Keterangan
2015	Penghargaan Pembina K3	Dengan 74 perusahaan yang mendapatkan penghargaan <i>zero accident</i> (Nihil Kecelakaan)
2016	Penghargaan Pembina K3	Dengan 50 perusahaan yang mendapatkan penghargaan <i>zero accident</i> (Nihil Kecelakaan)
2017	Penghargaan Pembina K3	Dengan 38 perusahaan yang mendapatkan penghargaan <i>zero accident</i> (Nihil Kecelakaan)
2018	Penghargaan Pembina K3	Dengan 47 perusahaan yang mendapatkan penghargaan <i>zero accident</i> (Nihil Kecelakaan)
2019	Penghargaan Pembina K3	Dengan 65 perusahaan yang mendapatkan penghargaan <i>zero accident</i> (Nihil Kecelakaan)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 2019

Dari data tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Riau mendapatkan penghargaan K3 kategori Pembina K3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan pembina K3 Provinsi diberikan kepada Gubernur yang telah berhasil melaksanakan program pembinaan K3 kepada perusahaan sehingga perusahaan yang bersangkutan memperoleh penghargaan SMK3 dan atau kecelakaan nihil sebanyak 0,05% dari

jumlah perusahaan pada wilayah yang bersangkutan. Di Provinsi Riau terdapat 8.663 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 283.149 orang. Meskipun penghargaan pembina K3 ini diberikan kepada Gubernur Riau tetap ada peran penting dari instansi daerah yang bertanggungjawab pada bidang ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan penghargaan pembina K3 yang mereka terima selama 5 tahun berturut-turut. Kegiatan pembinaan yang mereka lakukan belum maksimal dan terkesan formalitas saja. Karena berdasarkan data-data pendukung kegiatan pembinaan yang mereka lakukan, antara lain:

- a. Kegiatan pembinaan berupa pemberian seminar K3 yang diadakan setahun sekali dan hanya mengundang perusahaan-perusahaan yang sama setiap tahunnya, sehingga pemberian seminar ini belum menyentuh seluruh perusahaan yang sudah terdaftar di Provinsi Riau.
- b. Pemberian bimbingan bimbingan teknis untuk P2K3 di setiap perusahaan belum berjalan maksimal. Kegiatan ini terakhir diselenggarakan pada tahun 2017. Selain itu jumlah peserta yang mengikuti belum mencapai target yang diharapkan rencana kerja pembangunan daerah.
- c. Kegiatan pembinaan berupa pemberian instruksi ketika pengawas melakukan pemeriksaan ke lapangan belum mencapai target yang

ditetapkan sehingga pembinaan yang diberikan belum bersifat adil untuk seluruh perusahaan. Dengan adanya kegiatan pembinaan ini seharusnya bisa mendukung pencegahan terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, artinya pembinaan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau belum maksimal sehingga akan menyebabkan ketidaksadaran perusahaan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan SMK3 mereka serta usaha perlindungan pekerja belum diperhatikan dengan baik. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: **Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

## **2. KONSEP TEORI**

### **2.1 Pembinaan**

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang diartikan membangun, mengusahakan supaya lebih baik. Sejarah luasnya pembinaan yaitu proses pembuatan, cara membina, pembaharuan usaha dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan intruksi-intruksi dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi/lembaga. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses untuk membimbing dan mengarahkan tingkah laku seseorang kearah yang lebih baik agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan (Amarta, 2018).

Menurut Widjaja (dalam Solehan, 2017), mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan,

menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Menurut Santoso (dalam Harifal, 2014), fungsi pembinaan adalah membuat usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar pembinaan dapat berjalan baik maka dilakukan beberapa cara :

1. Pemberian bimbingan
2. Memberikan pengarahan
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan
4. Memberikan instruksi-instruksi

### **2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)**

(Triwibowo & Pusphandani, 2013) menjelaskan penerapan sistem manajemen K3 ialah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Guna tercapainya tempat kerja dan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. Dalam hal tersebut tidak kalah pentingnya kita harus memperhatikan dalam hal-hal penerapan

manajemen risiko di antaranya yaitu: pembentukan komitmen, perencanaan, pengorganisasian, penerapan, pelaporan dan evaluasi.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Alasan menggunakan metode kualitatif agar peneliti dapat lebih mendalam melihat pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui pengumpulan data metode penelitian kualitatif.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang melaksanakan pembinaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) sehingga organisasi perangkat daerah ini sangat berperan penting dalam mendapatkan penghargaan pembina K3 selama lima tahun berturut-turut untuk Pemerintah Provinsi Riau.

#### **3.3 Informan Penelitian**

Dalam penentuan informan penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih sangat memiliki kriteria sebagai sample). Alasan peneliti mengambil mereka sebagai informan karena mereka merupakan stakeholder yang berperan dan terlibat langsung dalam pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Provinsi Riau serta pihak yang menjadi sasaran pembinaan. Berikut yang menjadi informan di penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
2. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
3. Kepala bagian Ahli K3 di PT. Agro Abadi.
4. *Safety Coordinator* di PT. Trakindo Utama Branch Pekanbaru.
5. Tenaga Kerja di PT. Agro Abadi dan PT. Trakindo Utama Branch Pekanbaru.
6. Sekretaris Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Riau.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari informan secara langsung melalui observasi maupun wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui data tertulis yang lebih diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti melalui hasil dokumen-dokumen, buku peraturan perundang-undangan, serta bahan tertulis lainnya. Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dalam bentuk dokumen sebagai penunjang sebagai kelengkapan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Daftar perusahaan penerima penghargaan zero accident.
2. Data realisasi kegiatan pembinaan dalam 5 tahun terakhir.
3. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.
  - c. Peraturan Pemerintah N0. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - d. Permenaker No. PER-01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
  - e. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau.
  - f. Peraturan Gubernur Riau No. 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

## **3.6 Teknik Analisa Data**

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles and Huberman, sebagai berikut :

Kegiatan utama pada penelitian ini adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah teknik pengumpulan data dilakukan maka akan diperoleh data primer maupun sekunder yang dapat mendukung peneliti memahami penelitian pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Data-data yang peneliti dapatkan selama observasi di lokasi penelitian di reduksi kembali. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data ini membuat proses penelitian tentang

pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menjadi lebih fokus dan sesuai dengan gambaran yang akan penulis buat.

Setelah peneliti mendapatkan data-data yang sudah sesuai dari hasil reduksi data, kegiatan selanjutnya ialah menyajikan data-data tersebut. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini adalah dalam teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi pada pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dengan demikian peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Kegiatan terakhir pada penelitian ini yaitu membuat kesimpulan dari observasi selama di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif ini ialah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada terkait pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3). Temuan berupa deskripsi atau gambaran dari pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dengan adanya hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang telah didukung oleh data-data yang mantap sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

Pada akhirnya ditarik kesimpulan dari penelitian tentang pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang kredibel untuk dibaca.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau**

###### **a. Pemberian Bimbingan**

Bimbingan merupakan kegiatan dalam rangka memandu seseorang agar dapat memahami dirinya sendiri serta membuatnya sanggup untuk dapat bertindak sesuai tuntutan dari lingkungan sekitar. Tujuan pemberian bimbingan adalah mampu mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pemberian bimbingan akan membantu seseorang memangku jabatannya dengan maksimal, karena pemberian bimbingan bertujuan untuk memahami dan menghadapi permasalahan yang ada di organisasinya.

Pembinaan berupa pemberian bimbingan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah mereka berikan. Pemberian bimbingan yang perusahaan dapatkan berupa bimbingan teknis untuk anggota P2K3 nya. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan badan di perusahaan yang berisi ahli-ahli K3 untuk mengembangkan K3 di perusahaan tersebut, oleh sebab itu bimbingan teknis yang diberikan untuk anggota P2K3

perusahaan. Anggota P2K3 yang akan membantu perusahaan menerapkan K3 dan tentunya mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan yang diundang akan mengirimkan 2 perwakilan anggota P2K3nya untuk mengikuti bimbingan teknis. Untuk perusahaan yang sudah mengikuti bimbingan teknis tidak akan mengikutinya lagi karena akan bergantian dengan perusahaan yang lainnya.

Pembinaan berupa pemberian bimbingan teknis terakhir diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tahun 2017. Pemberian bimbingan teknis ini disiasati dengan menerima permintaan perusahaan untuk menjadi narasumber ketika perusahaan ingin melaksanakan bimbingan teknis sendiri, hal tersebut membuat pelaksanaan pembinaan ini belum berjalan maksimal karena tidak semua perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakannya. Mengingat dibutuhkan bimbingan tersebut diharapkan pemberian bimbingan dapat dilanjutkan kembali dan memperluas perusahaan yang diundang.

#### **b. Memberikan Pengarahan**

Pengarahan adalah suatu kegiatan pemberian informasi kepada subyek yang menjadi sasaran agar mereka melakukan apa yang diinginkan pemberi informasi. Pemberian pengarahan secara kontinuitas diharapkan akan membudayakan sesuatu yang ingin dicapai dan menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Pengarahan bisa dilakukan dengan cara *persuasive* atau bujukan. Sehingga pada

dasarnya akan mengajak subyeknya bekerja secara senang hati serta bergairah untuk melaksanakan apa yang diharapkan tersebut.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam rangka pembinaan berupa pemberian pengarahan dilakukan melalui menyelenggarakan seminar-seminar tentang K3. Seminar ini bukan hanya membahas sistem manajemen K3 saja tetapi membahas apapun obyek yang berkaitan dengan K3. Perusahaan yang diundang akan mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pembahasan di seminar. Kegiatan seminar dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan dalam rangka memeriahkan bulan K3 Nasional.

Bentuk pembinaan berupa pemberian pengarahan seperti seminar dan sosialisasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau belum dilaksanakan secara maksimal. Karena pembinaan berupa pemberian pengarahan belum menjangkau semua perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Pemberian seminar dan sosialisasi baru dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar-besar saja dan tergolong itu-itu saja dari tahun-tahun-tahun. Seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memberikan kegiatan pembinaan kepada perusahaan secara adil dan merata, sehingga kegiatan pembinaan berupa pemberian pengarahan ini dapat dirasakan oleh semua perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Karena dengan adanya seminar ataupun sosialisasi bisa membuka kesadaran-kesadaran perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen K3 sebaik mungkin. Dari kegiatan seminar dan

sosialisasi inilah langkah awal untuk menggalakkan budaya K3 di seluruh tempat kerja sehingga keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja terjamin.

### **c. Memberikan pendidikan dan pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses dari kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membina pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok yang ditujukan. Pendidikan adalah keseluruhan dari proses dan metode mengajar dalam rangka mentransfer pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya (bersifat teoritis). Sedangkan pelatihan adalah proses mengajar dengan teknik dan metode khusus sehingga seseorang mendapatkan keterampilan teknis tertentu (bersifat praktis). Jadi pemberian pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya.

Pembinaan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan terkait K3 memang tidak secara langsung perusahaan dapatkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Pembinaan melalui pemberian pendidikan dan pelatihan bukan salah satu program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dalam pemberian pendidikan dan pelatihan ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berperan memberikan pengetahuan baik teori maupun praktek kepada peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibuka perusahaan jasa K3 di Provinsi Riau.

### **d. Memberikan instruksi-instruksi**

Instruksi adalah perintah atau arahan untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas. Instruksi harus disampaikan secara jelas sehingga penerima instruksi dapat memahami dan melaksanakannya dengan baik. Selain itu instruksi juga akan membuat penerima instruksi memiliki kecakapan sesuai yang diinstruksikan agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.

Adanya kegiatan turun kelapangan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ke perusahaan-perusahaan membuat pemberian instruksi secara langsung juga berjalan. Pengawas ketenagakerjaan akan memeriksa seluruh norma di perusahaan termasuk norma K3 dan tentunya penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan tersebut. Setelah pemeriksaan perusahaan akan mendapatkan instruksi dari pegawai pengawas untuk mempertahankan atau meningkatkan penerapan sistem manajemen K3.

Pemberian instruksi merupakan kegiatan pembinaan yang bisa menyentuh langsung ke lokasi kerja dan melihat langsung penerapannya di setiap perusahaan. Tetapi kenyataannya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam memberikan instruksi kurang berjalan optimal. Pemberian instruksi kepada perusahaan masih mendahulukan jika terjadi kecelakaan dan menunda dalam rangka pencegahan. Pemberian instruksi juga tidak diikuti dengan tindak lanjut sehingga tidak menjamin perusahaan yang sudah mendapatkan instruksi mengikuti atau tidak.

#### **4.2. Faktor - Faktor Penghambat Kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau**

##### **a. Lokasi Perusahaan**

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau terhadap sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mengharuskan mengunjungi lokasi kerja dimana para tenaga kerja melakukan pekerjaannya. Dikarenakan lokasi kerja yang semakin luas mengharuskan pegawai pengawas turun bertim agar tetap melaksanakan tugas dan tentunya menjangkau perusahaan dengan perasaan lebih nyaman dan aman daripada melakukannya seorang diri. Hal tersebut ternyata membuat pembinaan kurang efektif karena menghasilkan jumlah perusahaan yang belum dikunjungi lebih banyak daripada perusahaan yang mendapatkan pembinaan.

##### **b. Kemampuan Perusahaan**

Penerapan sistem manajemen K3 berhubungan dengan kemampuan perusahaan yang di dalam penelitian ini lebih ditekankan pada finansial yang dimiliki perusahaan tersebut. Sehingga ketika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah membina sebuah perusahaan dan hasil akhirnya juga akan ditentukan dari kemampuan perusahaan tersebut. Mampu atau tidaknya serta cepat atau lambatnya perusahaan melaksanakan apapun yang sudah di instruksikan pihak Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ketika melakukan pembinaan.

##### **c. Sumber Daya**

Di dalam penelitian ini akan lebih fokus ke dua jenis sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sebagai pelaksana pembinaan yaitu berupa sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan yang seharusnya melakukan kegiatan pembinaan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah perusahaan yang akan dibina. Serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pembinaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terbentur dengan kurangnya anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran yang ada hanya cukup untuk melakukan pembinaan yang sifatnya belum menyeluruh ke perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Keterbatasan anggaran juga mengharuskan tidak terlaksananya kegiatan pembinaan seperti bimbingan teknis untuk perusahaan.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian terkait Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau belum berjalan maksimal. Ditinjau dari Pemberian bimbingan, pengarahan, pendidikan dan pelatihan dan instruksi-instruksi. Pemberian bimbingan yang diberikan kepada perusahaan berupa bimbingan teknis memang sudah dilaksanakan tetapi belum semua perusahaan yang mengikuti serta kegiatan pemberian bimbingan teknis sudah 3 tahun ini ditiadakan. Pemberian pengarahan seperti pengadaaan seminar dan sosialisasi belum menjangkau semua perusahaan yang ada dan baru dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar-besar saja dan tergolong itu-itu saja dari tahun-tahun-ketahun. Pembinaan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan pembinaan tidak langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau karena bukan salah satu program dari Disnakertrans dan pegawai Disnaker berperan menjadi mentor yang mengajar di diklat yang dibuka perusahaan jasa K3. Pemberian instruksi dilakukan dengan mendahulukan perusahaan yang terjadi kecelakaan kerja, periode pemeriksaan untuk setiap perusahaan tidak jelas dan tidak adanya tindak lanjut yang diberikan setelah instruksi diberikan.
2. Faktor-faktor penghambat pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Riau adalah sumber daya manusia yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang seharusnya mendapatkan pembinaan, luasnya cangkupan lokasi kerja pegawai pengawas sehingga kesulitan mencapai lokasi perusahaan, anggaran yang dibutuhkan tidak memadai untuk mengadakan dan mengoptimalkan segala bentuk kegiatan pembinaan yang seharusnya diberikan serta kemampuan perusahaan untuk merespon hasil pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bisa membuat sistem tindak lanjut ketika perusahaan sudah diberikan pembinaan berupa instruksi, misalnya perusahaan wajib menginfokan apakah sudah dilaksanakan instruksi yang diberikan melalui via WhatsApp dengan mengirimkan video kondisi setelah dan sebelum instuksi dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan jika seandainya pengawas ketenagakerjaan tidak mungkin untuk mengunjungi lagi secara langsung perusahaan tersebut.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau segera menambah jumlah sumber daya manusia yang

melakukan pembinaan kesetiap perusahaan yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan. Jumlah perusahaan yang harus dibina jauh lebih banyak dibanding personil pembinanya yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan. Rasio yang ideal yakni 1 pengawas ketenagakerjaan berbanding 5 perusahaan. Selain itu kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa membantu mensukseskan kegiatan pembinaan dapat lebih ditingkatkan lagi jika anggaran tidak memungkinkan. Lakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan disetiap kabupaten yang bisa mendukung berjalannya pemberian seminar dan sosialisasi terkait K3. Jika belum mampu mengundang seluruhnya, gunakan sistem bergilir untuk membuat semua perusahaan yang ada Provinsi Riau merasakan pemberian seminar dan sosialisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Amarta, M. R. E. (2018). *Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015*. Universitas Riau.
- Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Batjo, N., & Shaleh, M. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: Aksara Timur.
- Djarmiko, R. D. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dr. Kasmir, S.E, M. . (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Drs. Irzal, M. K. (2016). *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sharman, A. (2016). *From Accidents to Zero: A Practical Guide To Improving Your Workplace Safety Culture*. London: Routledge.
- Sinambela, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, G. W. (2016). *Management Obligations for Health and Safety*. New York: CRC Press.
- Solehan. (2017). *Pembinaan dan Pengawasan Camat terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tahun 2012-2015*. Universitas Riau.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Triwibowo, C., & Pusphandani, M. E.

(2013). *Kesehatan Lingkungan dan K3*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Zainal, V. R., Ramly, M., Mutis, T., & Arafah, W. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.